

ATTACHMENTS

Attachment 1



KRuHA National Coordinator Muhammad Reza in the discussion of Water Resources Bill in the office of Agrarian Reform Consortium, Pancoran, South Jakarta (Kompas, 2017).

Attachment 2



The head of National Commission on Human Right Nurkholis in Focus Group Discussion on Water (Konnasham, 2017).

Attachment 3



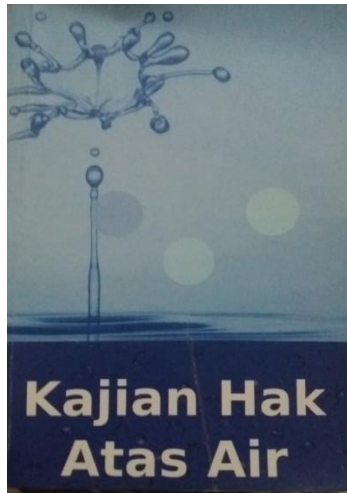
KRuHA demonstration toward water privatization in Jakarta (KRuHA, 2013).

Attachment 4



KRuHA campaign poster (KRuHA, 2013).

Attachment 5



Book made by KRuHA

Attachment 6



KRuha Coordinator with Meera Karunanathan (Blue Planet Project), Satoko Kishimoto (Transnational Institute), and Maude Barlow (Council of Canadians National Chairperson).

Attachment 7



koalisi rakyat untuk hak atas air
people's coalition for the right to water

Nomor : 001/Prog. Ord/Ext/KRuHA/XI/2016
Lampiran : 1 Bundel Kerangka Acuan
Perihal : Undangan sebagai Peserta

Jakarta, 23 November 2016

Kepada Yth,
Bapak / Ibu Sekalian (Daftar Terlampir)
di
Tempat

Dengan hormat,

~~Semoga Bapak, beserta keluarga, undangan, Tugan, XME. Bersama, kami~~
~~bermaksud mengundang Bapak dan Ibu untuk dapat hadir dan menjadi peserta aktif dalam~~
~~rangkain acara Konsolidasi dan Konsultasi Publik terkait Inisiasi UU Air yang baru, dan~~
~~akan diusulkan kepada pemerintah. Adapun pertemuan tersebut akan diadakan pada:~~

Hari / tanggal : Jumat, 29 November – 1 Desember 2016

Waktu : 09.00 s.d. selesai WIB (susunan acara terlampir dim.TOR)

Tempat : Unika Soegijapranata, Jl. Sawitatan Lubur, D/1, Gedung Dhuwur,
Talomawa, Bawumalik, Kota Semarang, Jawa Tengah 50235, Telp:
(024) 8441555 dan Wilma Salam, Jl. Jagang Lor RT 001/02,
Salam, Muntilan 56484 Jawa Tengah, Telp.: (0293) 588184

Sebagai petunjuk mengenai hal-hal yang kami harapkan untuk dapat disampaikan, teknis dan manual acara, serta keterangan lainnya mengenai acara ini, kami lampirkan Kerangka Acuan. Sehubungan dengan acara tersebut, besar harapan kami apabila Bapak berkenan untuk dapat menjadi Peserta Aktif dalam acara kami tersebut. Apabila ada yang hendak ditanyakan dapat menghubungi 081318835393 (Siglit Karyadi Budiono).

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Salam,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Muhammad Reza', written over a horizontal line.

Muhammad Reza
Koordinator KRuHA

Daftar Peserta

1. Komunitas-Komunitas Pengelola Sungai, Yogyakarta
2. Komunitas Jogja Berdaya
3. Romo Kirjito
4. Romo Endro
5. Agung Budyawati
6. Maskur Hasan
7. Roy Murtadho
8. Komunitas JMPPK
9. Setam / KPRI
10. Bina Desa
11. Lembaga Perdik
12. Sekolah Perempuan Aman Indonesia
13. Solidaritas Perempuan
14. Universitas Sanata Dharma
15. LBH Semarang
16. Sari Solo
17. SPI

Attachment 8

Kerangka Acuan

Konsolidasi dan Konsultasi Publik

Hak Atas Air dalam Proses Pembentukan Hukum di Indonesia: Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang dan Inisiatif Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai Air.

Semarang dan Magelang, Jawa Tengah, 29 November – 1 Desember 2016

A. LATAR BELAKANG

Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 85/PUU-XI/2013 lalu, telah secara tegas membatalkan Undang-Undang nomor 7/2004 tentang Sumber Daya Air. Putusan tersebut meneguhkan norma konstitusi, panduan bagi pengelolaan air di Indonesia dan secara khusus bagi pembastan Undang-Undang Air yang baru untuk mengganti UU no 11/1974 tentang pengaliran yang berlaku sementara. Suatu putusan penting yang dapat menjadi momentum mengembalikan kebijakan pengelolaan air ke dalam domain publik, sesuai amanat Konstitusi dan Norma Hak Atas Air. Putusan tersebut berimplikasi paralel pada beberapa momentum penting lainnya mulai dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memutuskan untuk membatalkan kontrak kerjasama antara PAM Jaya dengan PAM Lyonnaise Jaya (Palya) dan Aetra Air Jakarta, yang berakibat terjadinya pelanggaran Hak Atas Air. Pada level yang lain, momentum-momentum tersebut bergayung sambut dengan pernyataan sejumlah Kepala Daerah yang mendukung pengelolaan air harus berada domain publik dan tidak berpretensi untuk mengomersialisasi air.¹

Koalisi Rakyat untuk Hak atas Air (KRuHA) kemudian memulai inisiatif untuk mengadakan advokasi kebijakan nasional terkait tata kelola air. Advokasi ditujukan untuk mendorong adanya perbaikan pengaturan pengelolaan air sesuai kaidah hak atas air dengan fokus akuntabilitas negara sebagai *duty bearer* dan penguatan kapasitas serta kapeblitas warga negara sebagai *right holders*. Secara strategis, gerakan warga negara harus mampu mengembalikan arti sejati dari pengelolaan air terpadu (*genuine integrated water resources management*) yang berasal dari kearifan komunitas warga dalam memperfektukan air sejak ribuan tahun lalu, bukan skema ekonomistik dalam perbaikan masalah-masalah air.

Hingga saat ini, KRuHA setidaknya telah mempunyai 1 (satu) laporan kajian hak atas air serta 1 (satu) naskah akademik yang dapat terus disempurnakan lewat penyerapan praktek – praktek baik dan lestari di tingkat akar rumput. Hasil-hasil tersebut perlu difindak lanjut dengan menjadikannya sebagai bahan kampanye, arahan kebijakan, maupun pendidikan secara lebih luas pada berbagai tingkatan. Laporan kajian hak atas air dan naskah akademik RUU Air akan digunakan sebagai media komunikasi dan konsultasi warga negara dan kemudian akan di sampaikan kepada pemerintah desa – daerah – pusat sebagai maklumat.

Hal tersebut perlu segera dilakukan mengingat berbagai kasus di daerah membuktikan bahwa pelanggaran norma hak atas air justru terus kian masif terjadi, seiring dengan kuatnya paradigma pertumbuhan yang mengabdikan benak pengambil kebijakan. Paradigma tersebut mengakibatkan dasar-dasar pengelolaan sumber daya alam, agraria, tata ruang, termasuk di dalamnya air sebagai urusan yang saling terkait antara yang satu dengan yang lain, semakin mengutamakan cara pikir ekonomistik dan menjauh dari perspektif hak-hak rakyat. Kasus keringnya sumber air warga di Jogja karena masifnya pengambilan air tanah oleh industri pariwisata serta rusaknya hulu sumber sumber mata air di lereng

¹<http://indonesiankompass.com/head/2016/10/19/6456111/Kisah-Rupa-d-Buwakara-Melawan-Privatisasi-Air>

Merapi karena pertambangan galian C adalah satu contoh. Kasus-kasus lain seperti penataan hilir sungai yang tidak mengutamakan dialog dan mengabaikan kepentingan rakyat, masifisasi dana investasi infrastruktur yang salah satunya mendorong peningkatan industri semen yang mengancam sumber air warga pegunungan Kendeng, hingga bencana kekeringan dan banjir yang menimpa berbagai daerah adalah bukti bahwa tata kelola lestari air dan norma hak atas air telah diabaikan. Hal tersebut tentu belum menyertakan salah pikir dari otoritas pengelola air dan layanan publik yang justru salah memahami proses dan putusan MK tentang pengelolaan air, seperti yang tercatat bahwa ada PDAM justru membuat air minum dalam kemasan (AMDK), bukannya memperbaiki dan memperluas layanan air perpipaan. Hal lain yang perlu mendapat perhatian adalah fokus Pemerintah dalam penataan desa. Desa telah menjadi wilayah kompetisi komersial baru, menjadi wilayah politik global.

Belajar dari pengalaman advokasi sejenis terkait penyusunan suatu Undang-Undang oleh entitas masyarakat sipil, dimana seringkali substansi dikalburkan dan bahkan diselewengkan oleh DPR dan Pemerintah dalam proses yang tidak terbuka. KRuHA memandang bahwa substansi dari hak atas air yang telah disusun perlu di konsultasikan dan dijadikan pegangan oleh banyak kalangan lewat proses dari bawah (bottom up) sebelum disampaikan kepada otoritas yang bertanggung jawab membuat regulasi dan menyelenggarakan pengelolaan air.

B. KEGIATAN

Konsolidasi dan Konsultasi Publik dimaksud rencananya akan di selenggarakan dalam dua putaran yang saling terkait:

1. Seminar dan dialog publik (1 hari) yang akan memperdengarkan paparan dari para peneliti, akademisi dan testimoni warga terkait Naskah Akademik dan Kajian Hak atas Air. Forum ini dimaksudkan juga sebagai sarana pembekalan bagi peserta konsolidasi jejaring warga negara yang akan melakukan advokasi.
2. Konsolidasi dan Pembangunan Strategi Advokasi (2 hari) akan membahas berbagai isu krusial terkait air di desa dan di kota, memetakan situasi ekosistem air kekinian, termasuk ancaman, potensi dan kerentanan serta ketahanan warga.

C. TUJUAN

Diskusi diselenggarakan sebagai upaya membangun panduan gerakan warga negara untuk hak atas air dan legislasi yang berada pada wilayah kebijakan publik dan komunitas dalam perlindungan dan pemajuan hak atas air. Naskah akademik hendak mengupayakan pengamatan terhadap praktek dan proses yang terjadi dalam masyarakat, pertimbangan terhadap ejudikasi sebagai upaya penerjemahan norma dan fakta hukum, mendorong pewujudan kebijakan publik.

D. Berikut ini pertanyaan panduan yang dapat dikembangkan selama berlangsungnya diskusi:

- Bagaimana naskah akademik membahasakan secara baik HMN (hak menguasai negara) sebagai kewajiban negara melindungi hak atas air warga negara, baik desa maupun kota?
- Bagaimana mendorong pengakuan terhadap praktek dan proses yang berlangsung pada masyarakat, sejalan dengan syarat konstitusional dari hak atas air?
- Bagaimana kedua hal tersebut dapat dibangun dalam proses pembentukan peraturan perundangan dan praktik pengelolaan dan pelayanan air sehari-hari?

E. DAMPAK DAN CAPAIAN YANG DIHARAPKAN

- Adanya masukan terkait naskah akademik RUU Air
- Adanya rumusan untuk advokasi UU Air dan kebijakan tata kelola air ke depan.

F. PESERTA

40 orang yang berasal dari Tim Penyusun Naskah Akademik, Komunitas dan Jaringan KRuHA, serta Akademisi.

G. WAKTU DAN TEMPAT

Acara ini akan diselenggarakan tanggal 29 November 2016, di Fakultas Hukum Unika Soegijopranata dan dilanjutkan pada 30 November dan 1 Desember 2016, di Wisma Salam, Magelang.

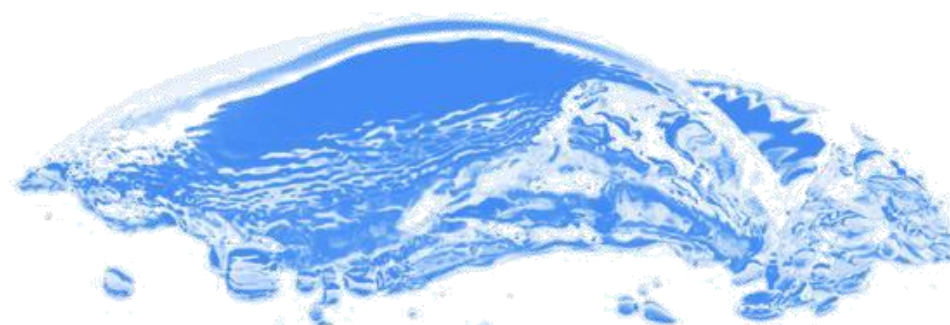
H. SUSUNAN ACARA

Tanggal	waktu	Acara	Keterangan
29 November 2016	08.30 – 09.00	Registrasi	Panitia
	09.00 – 09.15	Pembukaan	Unika Soegijopranata
	09.15 – 10.00	Pemaparan Proses dan Hasil-Hasil Draft Naskah Akademik dari tim Perumus: <ul style="list-style-type: none">• Benny Denang Setianto	Fasilitator: Henry Simamata
	10.00 – 10.15	Tanggapan dari Pembicara lain: <ul style="list-style-type: none">• Francis Wahono• Gunifno• Sigit Wijayanto	
	10.15 – 12.30	Diskusi dan Tanya Jawab	
	12.30 – 12.55	Rencana tindak lanjut	Fasilitator
	12.55 – 13.00	Penutup	KRuHA
	13.00 - Selesai	Makan Siang	Panitia
30 November 2016	... – 13.00	Registrasi	Panitia
	13.00 – 14.00	Pembukaan, perkenalan, dan orientasi forum	KRuHA
	14.00 – 15.30	Diskusi Panel I (Pembangunan dan Tata Kelola Air Lestari)	Fasilitator
	15.30 – 16.00	Break	Panitia
	16.00 – 17.00	Lanjutan Diskusi	Fasilitator
	17.00 – 18.30	Break ISHOMA	
	18.30 – 20.30	Diskusi Panel II (Desa – Kota dan Pencapaian Perluasan Pelayanan Air)	Fasilitator
1 November 2016	10.00 – 13.00	Diskusi Panel III (Ekstremisme dan Ketahanan Air Indonesia)	Fasilitator
	13.00 – 14.00	Break ISHOMA	Panitia
	14.30 – 16.30	Diskusi Panel IV (Strategi Advokasi Undang-Undang dan Kebijakan tentang Air)	Fasilitator

	16.30 – 19.00	Break Ishoma	Panitia
	19.00 - 20.00	Rencana Tindak Lanjut	Fasilitator

PENYELENGGARA

Acara ini akan diselenggarakan oleh Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air (KRuHA), Bina Desa, dan Unika Soegijapranata.



OUR RIGHT TO WATER



AN EXPOSÉ ON FOREIGN PRESSURE TO DERAIL THE HUMAN RIGHT TO WATER
IN INDONESIA



KRuHA

koalisi rakyat untuk hak atas air

people's coalition for the rights to water